



Buletin Parlamentaria



Besaran Biaya Disepakati, DPR Berhasil Tekan Biaya Haji 2023



3 DPR RI
Sampaikan
Dukacita
Peristiwa
Gempa Turki



4 Calon Dubes
LBPP Diharapkan
Perkuat Kerja
Sama Ekonomi
dan Pertahanan

Nomor 1234/III/II/2023 • Februari 2023



9 772614 339005



Besaran Biaya Disepakati, DPR Berhasil Tekan Biaya Haji 2023



Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi beserta Anggota Komisi VIII DPR RI meyetujui penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (15/2/2023).

Komisi VIII DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) beserta pemangku kebijakan terkait menyepakati besaran rata-rata Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) atau biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji tahun 2023 menjadi Rp49.812.711,12 atau sebesar 55,3%. Bipih ini lebih rendah dari usulan pemerintah lewat Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas yang mengusulkan biaya haji tahun ini menjadi Rp69,19 juta atau sebesar 70%.

"Alhamdulillah secara tegas beliau (Menag) menerima hasil kerja Panja BPIH untuk tahun 2023, tadi Ketua Panja sudah melaporkan, Bapak Menteri juga sudah menyetujui. Maka apakah kita sudah

bisa ketok persetujuannya?" tanya Ketua Komisi VIII DPR RI Ashabul Kahfi yang dijawab 'setuju' oleh peserta rapat kerja Komisi VIII DPR RI dan Menag dalam rangka penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2023 di Gedung Nusantara II, Jakarta, Rabu (15/2). Dari sembilan fraksi keputusan itu disetujui delapan fraksi, sementara fraksi PKS diketahui menolak usulan biaya tersebut.

Diketahui dalam paparan hasil rapat oleh Ketua Panitia Kerja (Panja) Badan Penyelenggara Ibadah Haji Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, biaya yang dibebankan meliputi biaya penerbangan, *living cost*, dan sebagian biaya paket layanan masyair. Sedangkan biaya yang bersumber dari nilai manfaat keuangan haji rata-rata perjemaah

sebesar Rp40.237.937 atau sebesar 44,7% meliputi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi dan komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di dalam negeri.

Ia menjelaskan, jemaah haji lunas tunda tahun 2020/2021 sebanyak 84.609 yang diberangkatkan pada tahun 2023 karena pandemi covid-19 tidak dibebankan biaya tambahan. Sedangkan, jemaah haji lunas tunda tahun 2022 dan 2023 masing-masing dibebankan biaya pelunasan sebesar Rp9,4 juta dan Rp23,5 juta.

Meski dilakukan efisiensi harga diberbagai bidang, namun Komisi VIII tetap menegaskan dan meminta pemerintah melakukan layanan terbaiknya pada jemaah. Marwan bahkan menyampaikan beberapa usulan dari Panja untuk pemerintah terkait peningkatan pelayanan ini diantaranya terkait pembinaan, dan perlindungan terhadap jemaah haji sejak sebelum, pada saat, dan setelah pelaksanaan ibadah haji.

"Melakukan revisi PMA mengenai rasionalisasi besaran setoran awal pendaftaran haji, menetapkan kebijakan rasionalisasi biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) sesuai dengan kondisi ekonomi secara berkala, mendorong jemaah haji untuk mencicil setoran lunas secara periodik hingga mendekati besaran Bipih pada tahun berjalan agar jemaah tidak terlalu berat pada saat pelunasan, dan mengintensifkan bimbingan manasik terhadap jemaah haji dan manasik khusus bagi jemaah haji lanjut usia dan penyandang disabilitas," tutup Marwan.

we/aha





DPR RI Sampaikan Dukacita Peristiwa Gempa Turki



FOTO: EOTI/PDI

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani.

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menyampaikan duka cita atas peristiwa gempa berkekuatan 7,8 Magnitudo (M) yang melanda di Turki hingga berdampak ke Suriah. Ia mengimbau Pemerintah Republik Indonesia untuk mengirimkan bantuan kepada para korban gempa.

"Atas nama DPR RI dan pribadi, saya sampaikan duka cita mendalam atas bencana gempa bumi di Turki dan Suriah. Doa saya dan rakyat Indonesia bersama warga Turki dan Suriah. Saya meminta Pemerintah Indonesia agar mengirimkan bantuan untuk meringankan beban saudara-saudara kita," tutur Puan, Selasa (7/2).

Secara resmi, dirinya pun akan mengirimkan surat melalui Parlemen

Turki untuk mengungkapkan rasa belasungkawa dari segenap bangsa Indonesia. Dirinya pun berjanji akan memantau melalui KBRI Ankara untuk tetap memperbarui informasi terkini para WNI yang berada di negara tersebut.

Ia juga mengimbau masyarakat Indonesia untuk berdoa sekaligus berpartisipasi membantu korban gempa Turki sesuai kapasitasnya masing-masing. "Mari kita bersolidaritas untuk membantu korban gempa dahsyat di Turki dan Suriah. Dengan semakin banyaknya uluran tangan yang datang, kita berharap kondisi di Turki dan Suriah bisa cepat kembali normal seperti sedia kala," ucapnya. **ts/rdn**



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

KETUA PENGARAH
Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

PIMPINAN PELAKSANA
Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI
Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

W.K PIMPINAN REDAKSI
Rizka Arinindya, S.Sos. (Kasubag Media Cetak dan Website)
Agus Budi Leksono, S.A.P (Kasubag Analisis Media)
Nita Juwita, S.Sos. (Kasubag Media Sosial)

REDAKTUR
Agung Hidayat, S.I.P, Ridwan Budiman, S.I.P, Muhammad Husen

REDAKTUR FOTO
M. Andri Nurdiansyah

SEKRETARIS REDAKSI
Fadlun Bariyah, Prima Danutirto, A.Md,
Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

ANGGOTA REDAKSI
Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianti, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Naden Ivan, S.I.Kom, Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom, Rahayu Setyowati, Virgianne Meiske Patuli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrulli, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimmbani, Siti Nadiyah, Nafisa Hanum Alaydrus, Bunga Leonnricha Firsta Dysie, Balggys Maeshyntha, Anju Alfonso Sitompul, Zulfikar Mubien

FOTOGRAFER
Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afrhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

ANALIS MEDIA
Supian, S.E, Larissa Amanda Indianti Siahna, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M, Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M, Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widayati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciani, Riska Ramadhani

INFOGRAFIS
Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

ADMINISTRASI
Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

PENERBITAN

PIMPINAN PENERBITAN
Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI
Mediantoro, S.E (Kasubag Produksi)

DESAIN GRAFIS
Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

IT MEDIA DIGITAL
Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI
Eny Sulistiawati, S.Kom (Kasubag Distribusi)

KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Ria Damayanti

ADMINISTRASI
STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI
Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa
Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421
Email : bag_penerbitan@dpr.go.id

**ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)**

Scan QR
untuk berita
selengkapny



Calon Dubes LBPP Diharapkan Perkuat Kerja Sama Ekonomi dan Pertahanan

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus melakukan Rapat Konsultasi dengan Komisi

I DPR RI membahas permohonan pertimbangan atas pencalonan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (Dubes LBPP) untuk tiga negara sahabat, yaitu Republik Perancis, Republik Filipina, dan Republik Turki.

"Baru saja kita rapat untuk mengambil keputusan terkait Dubes LBPP untuk negara sahabat yaitu Republik Perancis, Republik Filipina dan Republik Turki," ungkapnya usai



FOTO: RSB/PDT

Wakil Ketua DPR RI Lodewijk F Paulus saat diwawancarai usai memimpin rapat konsultasi secara tertutup, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2/2023).

”

BEBERAPA WAKTU LALU, DIKETAHUI, ADA SEORANG PILOT BERASAL DARI PAPUA DITANGKAP DI FILIPINA KARENA MEMBELI SENJATA SECARA ILEGAL UNTUK DIPASARKAN DI PAPUA (KELOMPOK KRIMINAL BERSENJATA). DENGAN ADANYA PENINGKATAN KERJA SAMA, DIHARAPKAN SUPLAI SENJATA KE PAPUA BISA DIPUTUS.

memimpin rapat konsultasi secara tertutup, di Gedung Nusantara III, DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (9/2). Disampaikan Lodewijk, Indonesia memiliki hubungan kerja sama yang baik dengan Republik Perancis, Republik Filipina, dan Republik Turki. Hal itu terlihat dari jalinan kerja sama antara negara di berbagai sektor.

Sementara, dari sisi pertahanan, Lodewijk berharap Indonesia akan mengembangkan kerja sama dengan Perancis, salah satunya dengan pembelian kapal selam. "Kami (DPR) berharap bukan hanya membeli, tetapi juga mendapatkan kerja sama transfer

teknologi dari Perancis. Sehingga kita bisa merawat dan memproduksi alat pertahanan kita sendiri," kata Politisi Fraksi Partai Golkar ini.

Sementara kerja sama dengan Filipina, Pimpinan DPR RI Bidang Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ini, berharap adanya peningkatan kerja sama di bidang pertahanan. "Beberapa waktu lalu, diketahui, ada seorang pilot berasal dari Papua ditangkap di Filipina karena membeli senjata secara ilegal untuk dipasarkan di Papua (Kelompok Kriminal Bersenjata). Dengan adanya peningkatan kerja

sama, diharapkan suplai senjata ke papua bisa diputus," tegasnya.

Terakhir, terhadap negara Turki, Lodewijk sempat sampaikan ucapan bela sungkawa atas musibah gempa tektonik yang terjadi di Turki dan Suriah baru-baru ini. Karenanya, dalam kesempatan ini pula, ia menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Indonesia yang telah sigap membantu penanganan gempa dengan mengirimkan bahan makanan dan tenaga medis.

Ia berharap, ke depannya, dengan adanya dubes Turki yang baru, kerja sama di sektor pertahanan dapat diperkuat. Salah satu produk andalan kerja sama adalah jenis medium tank kelas harimau. "Saya berharap kehadiran Dubes LBPP bisa memperkuat kerja sama antar negara, baik di bidang pertahanan maupun ekonomi," ungkapnya.

— **rmn/rdn**



Jazuli Juwaini Dorong Indonesia Berperan Aktif Wujudkan Perdamaian

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini Mendorong Indonesia untuk bisa berperan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia dengan cara aktif mengkampanyekan kerukunan antar suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Sebab menurutnya, manusia mempunyai hak atas keyakinannya dalam beragama dan berwarga negara.

"Kami fokus mewujudkan perdamaian dunia. Oleh karena itu bagaimana caranya Indonesia juga punya peran besar untuk mengingatkan negara-negara yang (dinilai) sedikit kadang-kadang rasis itu," ujar Jazuli dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan pakar terkait Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-India di Ruang Rapat Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/2).

Terkait dengan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-India, Jazuli berharap India bisa menjadi negara yang lebih demokratis. Pasalnya, tak jarang banyak hal yang dapat memicu konflik di dunia ini muncul dari India. "Kayak masjid (yang) sudah seratusan tahun digusur hanya gara-gara tidak punya IMB," imbuah Ketua Fraksi PKS DPR RI itu.

Jazuli pun menegaskan, semua orang memiliki hak untuk beribadah kepada Tuhannya sesuai dengan keyakinannya tanpa diganggu oleh penganut agama mayoritas di tempat dia tinggal. Ia berharap, dengan terciptanya kondisi yakni penganut agama mayoritas menghormati penganut agama minoritas di suatu



FOTO: ISBI/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dengan pakar terkait Penyusunan RUU Kerja Sama Pertahanan Indonesia-India di Ruang Rapat Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (6/2/2023).

”

BUKAN KARENA SAYA MUSLIM, SAYA TIDAK SUKA, MAU MASJID, MAU GEREJA ATAU TEMPAT IBADAH LAIN DIHANCURKAN TANPA ALASAN ITU, SAYA TIDAK SUKA. DI NEGARA (DENGAN) MAYORITAS MUSLIM ITU YA JANGAN DIGANGGU AGAMA YANG MINORITAS, TEMPAT IBADAHNYA JANGAN DIGANGGU.

negara, maka perdamaian dunia ini dapat diwujudkan bersama-sama.

"Bukan karena saya Muslim, saya tidak suka, mau masjid, mau gereja atau tempat ibadah lain dihancurkan tanpa alasan itu, saya tidak suka. Di negara (dengan) mayoritas muslim itu ya jangan diganggu agama yang minoritas, tempat ibadahnya jangan diganggu. Begitu juga sebaliknya, bagaimana kita juga ikut berperan untuk mewujudkan perdamaian dunia," tutur Legislator Dapil Banten II ini.

Selain itu, Jazuli juga berharap dengan adanya perhatian bersama untuk mewujudkan perdamaian dunia, konflik-konflik di dunia bisa berkurang agar nantinya tidak ada anak-anak, ibu-ibu, dan orang tidak berdosa yang tersiksa karena konflik yang terjadi. [gam,hal/rdn](https://www.gam.hal.rdn)

Scan QR untuk berita selengkapnya



Dukung Semangat Ratifikasi Konvensi Internasional Pelindungan dari Penghilangan Paksa

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah menyambut baik dan mendukung atas semangat pemerintah Indonesia untuk meratifikasi Konvensi Internasional untuk Pelindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa (*International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance*). Menurutnya, hal tersebut akan memberikan penegasan kepada citra negara Indonesia di dunia internasional dalam mengatasi berbagai isu dunia.

"Baik di Asean kita akan *hosting* ASEAN di sini, maupun juga terkait dengan Rohingya. Kita punya bobot yang jelas, kita punya komitmen yang jelas seperti Ukraina dan Timur Tengah. Ini tentu memberikan kita bobot yang cukup baik kalau misalnya kita bisa meratifikasi ini," ungkap Rizki Natakusumah dalam rapat Komisi I DPR RI RDP dengan Eselon I Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI di Senayan, Jakarta, Selasa (31/1).

Meski demikian, dirinya menyetujui apa yang disampaikan oleh pimpinan rapat, Abdul Kharis, bahwa hal tersebut tentu akan memakan waktu yang lama, terlebih akan berfokus pada implikasi internalnya. "Persoalan ini cukup kompleks. Apalagi kita di komisi kedaulatan (komisi I DPR RI) ini seringkali membahas isu terkait dengan Papua," tegasnya.

Dirinya berharap dengan adanya ratifikasi ini, tidak menimbulkan

”

KITA TENTU ENGGAK MAU MELIHAT KALAU MISALNYA SUDAH DIRATIFIKASI INI AKAN MEMBERIKAN IMPLIKASI YANG SANGAT NEGATIF. BUKAN KEPADA PENJAGAAN, TAPI TERKAIT DENGAN PERSETERUAN KITA DENGAN GOLONGAN-GOLONGAN ATAU OKNUM-OKNUM YANG SELAMA INI MEMPERALAT PAPUA UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI ISU HAK ASASI MANUSIA.

implikasi yang negatif. Sehingga menurutnya, pembahasan mengenai ratifikasi ini perlu langkah diplomasi yang antisipatif. "Kita tentu enggak mau melihat kalau misalnya sudah diratifikasi ini akan memberikan implikasi yang sangat negatif. Bukan kepada penjagaan, tapi terkait dengan persetujuan kita dengan golongan-golongan atau oknum-oknum yang selama ini memeralat Papua untuk dijadikan sebagai isu hak asasi manusia," ungkap Rizki.

Di akhir, ia mengaku bahwa hal tersebut menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi Indonesia. Ia pun berharap pemerintah dapat menyiapkan langkah-langkah antisipatif yang dapat mendukung penjagaan kedaulatan Indonesia.

— hal/aha



FOTO: JKA/PDT

Anggota Komisi I DPR RI Rizki Aulia Rahman Natakusumah saat mengikuti rapat Komisi I DPR RI RDP dengan Eselon I Kementerian Pertahanan RI, Kementerian Luar Negeri RI, Kementerian Hukum dan HAM RI di Senayan.

Scan QR untuk berita selengkapnya



Legislator Sebut Perpanjangan Jabatan Kades Bukan Fokus Revisi UU Desa

Wakil Ketua
Komisi II DPR RI
Yanuar Prihatin
menyampaikan
banyak substansi

yang menjadi poin revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut dia, perpanjangan jabatan kepala desa bukanlah fokus dari usulan revisi tersebut.

"Kalau saya pribadi, usulan teman-teman kemarin sebetulnya lebih merupakan pemantik saja untuk memberikan peringatan kepada kita semua. Terutama yang di pemerintah pusat, DPR, maupun presiden dan para menteri terkait bahwa ada sesuatu yang harus kita selesaikan di desa," ujar Yanuar dalam sebuah diskusi Dialektika Demokrasi bertema "Menimbang Urgensi Revisi UU Desa" di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2).

Yanuar menuturkan, selama ini perdebatan tentang revisi UU Desa hanya berfokus pada perpanjangan masa jabatan kepala desa dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Ia menilai, perpanjangan jabatan kepala desa hanya menjadi bagian kecil dari berbagai permasalahan yang ada di desa. Sebaliknya, lanjut dia, pesan utama dari gelombang protes kepala desa dan perangkat desa adalah status dan kesejahteraan.

"Masa depan desa itu lebih luas dari sekadar masa jabatan, lebih luas dari sekadar status, dan kedudukan perangkat desa. Bahkan, lebih luas dari sekadar kesejahteraan kepala desa dan perangkat desa," ujar Yanuar. Selanjutnya, ia mengatakan, ada lima pondasi pokok untuk



Wakil Ketua Komisi II DPR RI Yanuar Prihatin saat menjadi pembicara pada diskusi Dialektika Demokrasi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (2/2/2023).

memajukan desa yang kemungkinan akan dibahas pada revisi UU Desa nanti. Pertama, soal kepemimpinan desa, dimana hal ini sangat menentukan kemajuan desa.

Kemudian kedua, pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia di desa. Menurut Yanuar pula, meskipun setiap daerah tidak seragam, namun setiap desa tentu memiliki sumber

daya yang bisa dimanfaatkan bagi keperluan desa. Nah, banyak kepala desa yang tidak percaya diri dengan kualitas sumber daya lokalnya. Ini tugas pemerintah pusat membuat nyambung

Ketiga, manajemen pemerintahan dan pembangunan desa. Ia menilai ini merupakan poin kunci yang harus dicek bersama dalam merumuskan nantinya. Keempat, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat. Sejauh ini baik di desa sampai tingkat pusat dirasa masih jarang dilakukan pemberdayaan masyarakat.

Kelima, keuangan desa yang menurut dia, cara pandang terhadap keuangan desa harus diubah, lantaran selama ini perangkat desa hanya bergantung pada bantuan dari tingkat atasnya. "Jadi besarnya itu menurut saya yang harus ditangkap. Jangan kemudian terjebak pada topik-topik kecil, yang membuat kita tenggelam di situ dan akhirnya malah debat di situ," pungkasnya.

ann/mh

”

**JADI BESARNYA ITU
MENURUT SAYA YANG
HARUS DITANGKAP.
JANGAN KEMUDIAN
TERJEBAK PADA
TOPIK-TOPIK KECIL,
YANG MEMBUAT
KITA TENGGELAM DI
SITU DAN AKHIRNYA
MALAH DEBAT DI
SITU.**

Scan QR
untuk berita
selengkapnya



Kepolisian Harus Gelar Proses Etik untuk Tangani Kasus ‘Polisi Peras Polisi’

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni mendorong kepolisian agar menggelar proses etik Kisruh Bripka Madih dan eks penyidik Polda Metro Jaya inisial TG dalam kasus ‘polisi peras polisi’ terkait sengketa tanah milik orang tua Madih. Dia berharap kasus ‘polisi peras polisi’ tak terjadi di wilayah lain.

“Dikarenakan ini adalah oknum maka segerakan Propam segera sidangkan secara etik. Semoga ini tidak terulang kembali pada jajaran di polda lain atas sikap-sikap anggota masing-masing,” papar Sahroni kepada wartawan, Sabtu (4/2). Politisi Fraksi Partai Nasdem ini percaya Polda Metro dapat menuntaskan kasus ‘polisi peras polisi’ tersebut.

“Saya percaya Kapolda Metro bisa tuntaskan dengan cepat kasus anggotanya, lebih cepat lebih baik agar tidak jadi polemik di masyarakat,” ujar Sahroni. Di kesempatan lain Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani mengungkapkan, hingga saat ini masih banyak praktik pemerasan yang dilakukan oknum polisi. Namun, kata dia, kasus dugaan pemerasan ini perlu dilihat secara luas.

“Bahwa yang namanya praktik meminta uang atau memeras, itu sesungguhnya memang masih ada pada oknum polisi kita, bukan kepada lembaga kepolisian secara keseluruhan. Saat ini ramai di media polisi peras polisi. Ini kan harus kita lihat tidak hanya pada kasus ini saja. Tetapi pada problem umumnya atau besarnya,” kata Arsul Sani.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni.



FOTO: IKA/PDT

Polda Metro Jaya menyampaikan akan menyelidiki dugaan polisi diperas polisi itu. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, dugaan pemerasan itu diungkapkan Bripka Madih, seorang anggota Provost

”

SAYA PERCAYA KAPOLDA METRO BISA TUNTASKAN DENGAN CEPAT KASUS ANGGOTANYA, LEBIH CEPAT LEBIH BAIK AGAR TIDAK JADI POLEMIK DI MASYARAKAT.

Polres Metro Jakarta Timur. Bripka Madih mengaku, dirinya diperas oleh penyidik di Polda Metro Jaya. Dugaan pemerasan terjadi ketika Bripka Madih hendak melaporkan kasus penyerobotan lahan yang dialaminya.

Sebelumnya Polda tersebut akan mengkonfrontasi Bripka Madih dan eks penyidik inisial TG dalam kasus ‘polisi peras polisi’ buntut sengketa tanah milik orang tua Madih. Dalam konfrontasi, Propam Polda Metro Jaya akan dilibatkan, lantaran kedua belah pihak merupakan anggota Polri. Saat ini, kata Trunoyudo, pengakuan yang disampaikan oleh Bripka Madih tengah dialami oleh penyidik Bidang Profesi dan Pengamanan (Bid Propam) Polda Metro Jaya. “Saat ini Polda Metro Jaya akan mendalami hal dugaan pemerasan tersebut,” katanya. **ssb/aha**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Propam Didesak Evaluasi Penetapan Mahasiswa UI sebagai Tersangka

Anggota Komisi III DPR RI Habiburrohman mendesak Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Metro Jaya memeriksa penyidik yang menetapkan Mahasiswa Universitas Indonesia (UI) M Hasya Atallah Saputra menjadi tersangka. Hasya adalah mahasiswa UI yang meninggal dunia setelah tertabrak pensiunan polisi bernama AKBP (Purn) Eko Setia BW, dan Hasya ditetapkan sebagai tersangka.

"Saya minta Propam turun, diperiksa ini penyidik-penyidiknya ini. Bagaimana gitu kan, bisa menetapkan orang meninggal sebagai tersangka?" ujarinya kepada awak media di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (31/1). Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berpendapat penetapan Hasya sebagai tersangka sangat tidak masuk akal dan melukai

”

SAYA MINTA PROPAM TURUN, DIPERIKSA INI PENYIDIK-PENYIDIKNYA INI. BAGAIMANA GITU KAN, BISA MENETAPKAN ORANG MENINGGAL SEBAGAI TERSANGKA?

Anggota Komisi III DPR RI Habiburrohman.

rasa keadilan. Oleh karena itu, Habiburrohman meminta kasus penabrakan ini diperiksa ulang.

"Janggalnya kenapa? Kalau tidak *ngebut*, bagaimana mungkin bisa melindas sampai meninggal orang. Harus diusut ulang. Jangan sampai karena itu mantan anggota Polri, yang mengusut juga anggota Polri, ada *privilege* (untuk penabrak). Jangan sampai muncul seperti itu," ungkap Habiburrohman.

Bukan hanya meminta pemeriksaan ulang, ia juga mendorong agar AKBP (Purn) Eko Setia BW selaku penabrak Hasya dihukum berat, dan nama baik Hasya dipulihkan karena telah dijadikan tersangka. "Karena memang tidak masuk akal, tidak mungkin orang sudah mati ditetapkan tersangka. Kalau anda baca (Pasal) 77 KUHP saja, orang yang ditetapkan tersangka masih hidup, lalu meninggal dunia, gugur. Ini orang sejak awal meninggal, ditetapkan sebagai tersangka," imbuhnya.

Sebelumnya diberitakan, polisi menetapkan Hasya, mahasiswa UI yang meninggal diduga ditabrak pensiunan polisi, AKPB Purnawirawan Eko Setia BW, sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu diketahui setelah keluarga Hasya menerima surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) perkara kecelakaan lalu lintas dengan nomor B/42/1/2023/LLJS tertanggal 16 Januari 2023. Dalam surat itu terlampir juga surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dengan nomor B/17/1/2023/LLJS. Hal itu karena korban telah meninggal dunia.

ssb/aha



Scan QR untuk berita selengkapnya



FOTO: JKA/PDI

Pembebasan Lahan Hutan Diprioritaskan untuk Kepentingan Masyarakat Bukan Perusahaan

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menjelaskan bahwa pelepasan lahan hutan di Desa Kota Niur, Provinsi Bengkulu tidak mengarah pada upaya perlindungan masyarakat yang sudah tinggal secara turun temurun. Sebab banyak kawasan perkebunan sawit dan pertambangan berada di kawasan hutan.

"Pemerintah pusat dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) harus bisa menertibkan wilayah konservasi. Jika pembebasan lahan hutan tersebut mengarah pada perluasan, kemudian fungsinya beralih dari kawasan hutan menjadi wilayah pertambangan, maka KLHK harus bertanggung jawab dan memiliki kajian yang mendalam terhadap hal tersebut," tutur Dedi saat mengunjungi Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kamis (2/2).

Politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa kedatangannya ke Bengkulu untuk membantu memberikan solusi, agar Pelepasan Hutan Buru nantinya dapat dikelola menjadi hak masyarakat. Melihat sejauh ini Hutan Buru sudah menjadi tumpuan ekonomi masyarakat sekitar.

"Ketika negara tampil, misalnya, pemasukan kawasan Hutan Buru ini uangnya masuk ke kas negara lewat KLHK. Kemudian uangnya ke mana? Ingin saya, uangnya balik lagi ke sini. Untuk apa? *Supporting* masyarakat bertani, masyarakat bercocok tanam, masyarakat mengelola



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat mengunjungi Desa Kota Niur Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, Kamis (02/02/2023).

hutan produksi, serta masyarakat untuk infrastruktur, harusnya begitu," tuntasnya.

Namun dalam pelaksanaannya, Dedi menambahkan agar proses pelepasan Hutan Buru dilakukan secara transparan, adil dan sesuai

”

KETIKA NEGARA TAMPIL, MISALNYA, PEMASUKAN KAWASAN HUTAN BURU INI UANGNYA MASUK KE KAS NEGARA LEWAT KLHK. KEMUDIAN UANGNYA KE MANA? INGIN SAYA, UANGNYA BALIK LAGI KE SINI.

aturan. "Penyelesaian yang tidak sesuai tujuan dan aturan, akan menimbulkan konflik. Apalagi, jika proses tersebut ditanggung oleh kepentingan ekonomi dan tidak memperhatikan asas kelestarian hutan, serta lingkungan hidup," tegasnya.

Ke depan, ia bersama Anggota Komisi IV lainnya segera mengadakan rapat kerja di Senayan. Tujuannya, mempercepat proses pelepasan tanah dan pelepasan kawasan hutan yang nanti akan diberikan kepada masyarakat. "Kami akan mengadakan rapat kerja dengan KLHK. Saya harap program pelepasan lahan ini bisa masuk ke dalam program prioritas. Hal ini bertujuan supaya tidak terjadi konflik dan ketidakadilan," tutupnya.

dip/mh

Scan QR untuk berita selengkapnya



Sulaeman Hamzah: Komisi IV Akan Tinjau Permasalahan Limbah 'Tailing' PT Freeport

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menanggapi aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk *tailing* yang disebabkan oleh PT. Freeport Indonesia. Sebab, permasalahan limbah itu dirasakan oleh masyarakat wilayah Timika telah membuat kerusakan lingkungan, seperti pendangkalan sungai yang menyebabkan hilangnya akses jalan, kehilangan hutan sebagai tempat pencaharian makan, dan kehilangan

air bersih. Komisi IV pun menyatakan akan melakukan peninjauan ke Papua untuk mengetahui dampak kerusakan lingkungan dari limbah yang disebabkan oleh PT. Freeport tersebut.

"Pertama, dengan (adanya) kunjungan teman-teman dari DPRP, masalah semakin terang-benderang bahwa selama ini komunikasi terpisah antara Komisi IV dengan Freeport memang terbatas kepada daerah-daerah yang memang diklaim menjadi wilayah tanggung jawab Freeport. Tetapi, dampak dari limbah tailing ini meluas sampai kemana-mana, seperti tadi sudah dijelaskan dari dua sungai yang

tadinya itu jadi alur pembuangan *tailing* ternyata sekarang melebar sampai jauh bahkan menutup sampai ke pulau dan masyarakat praktis tidak bisa jalan (dengan) leluasa seperti sebelumnya," jelas Sulaeman, Selasa (1/2).

Adanya limbah tersebut berdampak terhadap mata pencaharian masyarakat tradisional, seperti untuk mencari ikan. Menurutnya, laut telah tercemar hingga menimbulkan penyakit terutama bagi anak-anak kecil yang kulitnya sensitif. Selain itu, masyarakat juga kesulitan untuk mencari air bersih, mereka harus mencari ke tempat yang jauh ditambah akses jalan yang sulit karena adanya pendangkalan sungai.

Komisi IV DPR RI pun, menurutnya, akan melakukan kunjungan untuk mengetahui sejauh mana dampak kerusakan lingkungannya. "Kita juga akan melakukan kunjungan ke sana, mungkin pada saat reses kalau disepakati nanti dalam penentuan tempat reses, daerah pemilihan saya sendiri di Papua, saya akan minta supaya kunjungan komisi dalam reses berikutnya ini kita fokus ke Freeport untuk mengetahui sejauh mana dampak yang sebagaimana diceritakan tadi," ujar Legislator dapil Papua itu.

Ia berharap informasi yang telah diterima dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua dalam Rapat Dengar Pendapat dan melalui kunjungan Komisi IV nantinya, dapat mengatasi masalah mengenai limbah tersebut.

[rrs.gal/rdn](https://www.rpr.go.id)



FOTO: MUN/PDI

Scan QR untuk berita selengkapnya



Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah saat menerima aspirasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) mengenai permasalahan limbah berbentuk *tailing* yang disebabkan oleh PT. Freeport Indonesia. di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (1/2/2023).

Pemerintah Pusat Harus Prioritaskan Infrastruktur yang Pengaruhi Ekonomi Nasional

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw mendorong agar pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan infrastruktur yang berdampak langsung bagi ekonomi nasional. Pemerintah pusat pun diharapkan segera menyelesaikan kebutuhan infrastruktur daerah, termasuk di Kabupaten Blitar, Jawa Timur.

Saat ikut meninjau infrastruktur di Jatim tersebut Komisi V melihat bahwa dukungan anggaran yang lebih besar dibutuhkan untuk tiga prioritas infrastruktur, yakni pembangunan jembatan untuk pelurusan Kali Legi, pembangunan Pasar Kesamben yang mengalami kebakaran pada 27 November 2022 lalu, dan peningkatan kelas jalan Brongkos-Ngembul di Kecamatan Binangun. Apalagi percepatan pembangunan jalan di daerah menjadi kebutuhan vital bagi masyarakat untuk mobilitas sosial dan ekonomi.

"Kami akan minta agar Pemkab Blitar dan Dirjen Bina Marga PUPR berkoordinasi untuk penanganan ruas-ruas jalan yang menjadi prioritas. Selanjutnya akan dilaporkan dalam rapat Komisi V untuk dibahas dan tindaklanjuti dalam rapat bersama mitra kerja Komisi V DPR RI, agar permasalahan tersebut segera diatasi, terutama masalah infrastruktur dan transportasi," papar Roberth di Blitar, Kamis (2/2).

Di samping itu, Kunjungan Kerja Spesifik ini merupakan implementasi dari fungsi anggaran dan pengawasan terhadap pelaksanaan



FOTO: UPI/PTD

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Roberth Rouw (kiri) dan Tim Kunspek Komisi V DPR RI saat meninjau infrastruktur di Jatim.

APBN. Dalam kunjungan tersebut, tim meninjau pasar induk yang terbakar hingga menghancurkan hampir seluruh bangunan pasar yang terdiri dari ratusan lapak dan kios. Maka dari itu, menurutnya Pemerintah pusat harus memberi bantuan, agar masyarakat kembali beraktivitas dan mendapat tempat yang lebih layak.

"Oleh sebab itu, kami akan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) untuk mempercepat pembangunan jalan daerah, sebagai amanat dari UU No.2/2022 yang memprioritaskan jalan daerah. Kami meminta pelaksanaan pembangunan jalan oleh pemerintah pusat bisa terlaksana," imbuhnya

Tentu saja, menurut Roberth, salah satu masalah yang membutuhkan perhatian adalah ketersediaan anggaran. Pasalnya, banyak sekali daerah

yang menurutnya membutuhkan infrastruktur dan transportasi. Sehingga dirinya menilai anggaran yang ada sekarang ini dirasa kurang, banyak sekali hal yang butuh dukungan anggaran, yang mungkin dirasakan tidak cukup, maka daerah yang menurutnya membutuhkan pembangunan infrastruktur dan transportasi dapat diatasi.

"Ya sementara ada beberapa pabrik gula yang menurut saya, ini yang merupakan objek vital nasional terkait dengan kebutuhan bahan pangan nasional, karena dengan peningkatan kelas jalan dapat mempercepat pengiriman, khususnya jalan yang dilalui truk yang bermuatan lebih harus menggunakan jalan khusus sesuai dengan keperluan mobilitas usahanya," tutup Politisi Fraksi Partai NasDem ini.

upi/mh



Pemerintah Pusat Harus Bantu Pembangunan Simpang Tujuh Aceh

Komisi V DPR RI mendorong Pemerintah Pusat membantu proses revitalisasi Simpang Tujuh Ulee Kareng di Provinsi Aceh. Jalan tersebut berada di pusat Kota Banda Aceh. Kondisinya saat ini dinilai sangat semrawut. Di pinggir jalan ada pasar tumpah dan ruas jalannya pun kecil sehingga sering terjadi kemacetan.

Pemerintah Kota Banda Aceh berencana memugar jalan tersebut. Rencananya, ruas-ruas jalan akan diperlebar. Selain itu, nantinya akan dibangun jembatan layang sebagai tempat perlintasan tambahan bagi berbagai kendaraan.

Anggota Komisi V DPR RI Irmawan mendukung langkah tersebut. Ia menilai bahwa Simpang Tujuh memang perlu ditata. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu pun ingin agar Simpang Tujuh bisa menjadi ikon Kota Banda Aceh.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Pemerintah Kota Banda Aceh sudah berusaha melakukan penataan Simpang Tujuh. Namun, kata Irmawan, Pemerintah Daerah memiliki anggaran yang terbatas. Oleh sebab itu, ia berharap agar Pemerintah Pusat memberikan bantuan.

"Karena ini kan masuk ke wilayah Kota Banda Aceh, jadi ternyata APBD Banda Aceh itu tidak cukup untuk membangunnya. Maka kita coba bawa teman-teman dari Komisi V dan Kementerian PUPR,



FOTO:NDN/PDT

Anggota Komisi V DPR RI, Irmawan (kedua dari kiri) saat mengikuti agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (2/02/2022).

”

KARENA INI KAN MASUK KE WILAYAH KOTA BANDA ACEH, JADI TERNYATA APBD BANDA ACEH ITU TIDAK CUKUP UNTUK MEMBANGUNNYA. MAKA KITA COBA BAWA TEMAN-TEMAN DARI KOMISI V DAN KEMENTERIAN PUPR, MUDAH-MUDAHAN KE DEPAN BISA DIBANGUN DENGAN ANGGARAN DARI APBN.

mudah-mudahan ke depan bisa dibangun dengan anggaran dari APBN," harapnya usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (2/2).

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi V Ruslan M. Daud. Ia menjelaskan bahwa setelah disempurnakannya undang-undang tentang jalan, maka sudah seyogyanya Pemerintah Pusat memberikan bantuan dalam penataan jalan lintas kabupaten tersebut.

"Undang-Undang Jalan Nomor 38 Tahun 2004 ini sudah disempurnakan. Jadi, tidak ada istilah lagi APBN tidak bisa masuk ke ruas-ruas jalan yang memang menghubungkan kabupaten ataupun provinsi," jelasnya. — **ndn/mh**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Evita Nursanty Dorong PTPN Lakukan Inovasi dan Pengembangan Sektor Pariwisata

Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty menilai dari 14 (empat belas) PT Perkebunan Nusantara dalam bentuk induk (holding), terdapat tiga PTPN yang mendapatkan sorotan karena dinilai memiliki kinerja yang dirasa masih kurang. Tiga PTPN tersebut adalah PTPN XII, PTPN IX, dan PTPN VIII.

"Dari 14 PTPN kita lihat perkembangannya cukup baik. Kita mendukung dan mendorong PTPN VIII ini, karena kalau saya lihat PTPN VIII ini potensinya sangat luar biasa tetapi mungkin pengelolaannya yang selama ini kurang baik. Setelah kita (Komisi VI) lihat (paparan) tadi, mereka sudah melakukan inovasi baru untuk memperbaiki *performance* mereka di luar dari produk mereka, seperti karet,

kelapa sawit, dan sebagainya," jelas Evita kepada Parlementaria usai melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI dengan PTPN di Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/2).

Menurut Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu, PTPN memiliki beberapa destinasi wisata yang

”


MEREKA (PTPN) KAN HARUS PUNYA PRIORITAS YANG MANA YANG AKAN DIJADIKAN PRIORITAS BAGI MEREKA DAN KITA AKAN ARAHKAN TERUS,

dapat dikembangkan. Meski demikian, dirinya masih heran mengapa sektor pariwisata yang digarap oleh BUMN di bidang perkebunan itu masih kurang dikenal oleh masyarakat umum.

Beberapa potensi wisata, misalnya wisata kebun teh, wisata air panas di Ciater Subang, dan destinasi wisata lain menurutnya dapat dikembangkan.

"Tapi kita lihat (wisata itu) kurang didengar (masyarakat). Sementara di Bandung ini kita dengar ada Rumah Sosis dan lain-lain, pasti itu kan ada sesuatu yang salah kenapa bisa kurang didengar oleh masyarakat. Ini yang harus kita perbaiki, di mana ada potensi yang sangat luar biasa, tetapi kenapa kita tidak mampu untuk *mem-branding* produk yang kita miliki ini," ujarnya.

Meskipun demikian, ia mengakui bahwa Dirut PT Perkebunan Nusantara (PTPN) sebagai holding sudah banyak melakukan evaluasi yang berdampak baik kepada institusi tersebut. Ia pun berharap semoga hal itu dapat terus mendorong inovasi kedepannya. Hal itu sebagaimana ditunjukkan dengan melihat potensi sektor kelapa sawit yang kemudian dilakukan Kerja Sama Operasional (KSO) dengan PTPN III di Medan.

Di sisi lain, dari beberapa program yang akan dilakukan oleh PTPN, ia berharap lebih baik untuk fokus terhadap satu program dahulu yang menjadi prioritas. Oleh karena itu, tidak mungkin menjalankan sekaligus semua program tersebut. "Mereka (PTPN) kan harus punya prioritas yang mana yang akan dijadikan prioritas bagi mereka dan kita akan arahkan terus," tutupnya. 



Anggota Komisi VI DPR RI Evita Nursanty saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi VI DPR RI dengan PTPN di Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/2/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnya



Jadi Bagian Pembangunan Kereta Cepat, Stasiun Halim Bisa Jadi Tempat Berkumpul

PT KCIC sebagai penanggung jawab pembangunan Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) akan membangun Stasiun Halim sebagai bagian dari *Transit Oriented Development* (TOD). Anggota Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo berharap rencana tersebut dapat menjadikan kawasan halim sebagai titik berkumpulnya masyarakat untuk berkegiatan maupun sekadar berpindah moda transportasi.

"Saya berharap di Halim, wilayah Jakarta Timur itu benar-benar menjadi tempat berkumpulnya orang karena kita tahu bersama bahwa kereta api adalah moda transportasi massal. Kalau saya sarankan semua orang menggunakan kereta api untuk mengurangi kemacetan yang ada. Dan itu Kereta Cepat Jakarta Bandung dan bisa aja nanti bisa berlanjut ke tempat lain," ujar Politisi PAN itu.

Ditemui **Parlementaria** usai rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI ke Kantor Pusat KAI di Bandung pada Kamis (2/2), Eko menjelaskan bahwa kawasan seluas 2,6 hektar tersebut nantinya akan didukung oleh perkantoran, apartemen hingga rumah sakit. Tak hanya sebagai titik henti kereta cepat, Stasiun Halim juga menghubungkan para penumpang dengan moda transportasi *Light Rapid Transit* Jakarta Bogor Depok Bekasi (LRT Jabodebek).

"Buat saya itu stasiun kereta api yang kekinian dan terbesar jika dibandingkan dengan stasiun yang ada. Kurang lebih 2,6 hektar untuk stasiun ditambah perkantoran

ada tempat MICE, juga ada rumah sakit besar dan juga ada hotel dan apartemen. Tentunya yang diutamakan adalah stasiun tersebut," jelasnya.

Legislator Dapil DKI Jakarta I yang meliputi kawasan Jakarta Timur itu mengingatkan agar kecepatan dan ketepatan menjadi prioritas dalam pengerjaan infrastruktur KCJB

”

KALAU SAYA SARANKAN SEMUA ORANG MENGGUNAKAN KERETA API UNTUK MENGURANGI KEMACETAN YANG ADA. DAN ITU KERETA CEPAT JAKARTA BANDUNG DAN BISA AJA NANTI BISA BERLANJUT KE TEMPAT LAIN.

maupun sarana pendukungnya. Ia juga sempat menyinggung terkait peristiwa anjloknya kereta teknis pada proyek tersebut.

"Dalam kondisi seperti ini, kebutuhan yang sangat penting sekali adalah kecepatan dan ketepatan. Jadi, jangan sekadar cepat aja, kalau tidak tepat. Akhirnya terjadi seperti yang kita ketahui bersama ada musibah, ada *error* dan sebagainya. Itu harus kita hindari apalagi sampai ada kematian," kata Eko.

Anggota Badan Anggaran ini juga menyebutkan dalam pembangunan TOD diperlukan sinergitas baik antar BUMN maupun perusahaan swasta. Ia mengumpamakan, tidak hanya moda transportasinya yang terintegrasi namun juga bisnis-bisnis yang ada di baliknya. Dilansir dari berbagai sumber,

TOD Halim sendiri telah dilirik oleh beberapa investor. Adapun rencananya selain Halim, PT KCIC akan membangun tiga TOD lainnya di sekitar stasiun pemberhentian KCJB.

uc/mh



FOTO: LUCAS/PIOT

Anggota Komisi VI DPR RI, Eko Hendro Purnomo saat rapat Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kantor Pusat KAI di Bandung pada Kamis (2/2/2023).

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Komisi VIII Soroti Lembaga Pendidikan Keagamaan yang Mengajarkan Paham Intoleransi

Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Ali Ridha menyoroti adanya lembaga pendidikan keagamaan, baik itu madrasah ataupun pondok pesantren yang mengajarkan paham-paham intoleransi. Ia juga menyinggung soal adanya lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan kekerasan terhadap paham-paham yang sudah ada dan ini sudah sering terjadi.

"Ada beberapa lembaga atau pondok pesantren yang mengajarkan tentang intoleransi yang kemudian dapat memicu adanya peristiwa radikalisme," ungkap Ali usai pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/1).

Ali menyebut ajaran ini dapat menimbulkan perpecahan, baik itu sesama agama Islam maupun antar umat beragama. Sebab, paham ajaran itu menyalahkan bahwa ajaran agama lainnya itu adalah salah atau sesat. "Ajaran-ajaran ini kita sebut saja tidak perlu khawatir bahwa ini adalah lembaga-lembaga yang mencoba mengajarkan paham-paham salafi wahabi dan kemudian paham ini tidak bisa diterima di negeri ini," sebut Ali.

Kemudian Ali mencontohkan, beberapa negara yang sudah mengalami peristiwa perpecahan dengan ajaran paham itu yang mengakibatkan pertumpahan darah antar sesama umat Islam. "Kita coba kasih contoh di beberapa negara



Anggota Komisi VIII DPR RI Muhammad Ali Ridha saat pertemuan dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur, Senin (30/1/2023).

lain yang mengajarkan paham wahabi ini itu tidak berjalan dengan baik, di negara tersebut terjadi pemberontakan dan pembunuhan sesama agama Islam, hanya karena paham ini mengajarkan untuk tidak menghargai perbedaan, begitu ada paham yang berbeda dengan ajaran ini maka itu dikafirkan dan dihalalkan darahnya," urainya.

Oleh sebab itu, pada kesempatan tersebut, Ali mempertanyakan kepada Kakanwil Provinsi Jawa Timur dan hasilnya pondok pesantren yang mengajarkan paham ajaran intoleransi tersebut ternyata belum memiliki izin. "Nah itu kemudian kami yang pertanyakan kenapa bisa ada lembaga yang belum memiliki izin lantas mereka beroperasi," ungkap Ali.

Ia juga meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan pengawasannya terhadap lembaga-lembaga pendidikan keagamaan dan lebih selektif dalam memberikan izin kepada lembaga pendidikan keagamaan, agar kasus yang terjadi di Pamengkasan tidak terjadi di tempat lainnya.

"Saya memohon kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama untuk sangat selektif dalam memberikan izin kepada pondok-pondok pesantren yang kemudian itu nanti akan digunakan untuk mengajarkan paham-paham intoleran, termasuk melakukan pengawasan kepada lembaga-lembaga pendidikan agama yang belum memiliki izin tetapi sudah beroperasi," tutup Ali. [qq/aha](#)



Komisi IX DPR Minta Fasilitas Kesehatan Bagi Pekerja IKN Diperhatikan



FOTO: SKR/PDT

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska saat mengikuti pertemuan kunjungan kerja Komisi IX DPR RI di Titik Nol Ibu Kota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (02/02/2023).

Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska meminta agar Kementerian Kesehatan memberikan perhatian terhadap penyiapan fasilitas kesehatan bagi orang-orang yang bekerja membangun Ibu Kota Nusantara (IKN) dan meminta BPJS Ketenagakerjaan memperhatikan jaminan sosial bagi pekerja-pekerja yang bekerja di IKN.

"Jangan sampai ada hal-hal yang negatif terkait kesehatan, terkait jaminan tenaga kerja yang mencuat ke atas, karena itu akan menimbulkan polemik baru, dianggap kita tidak terlalu siap untuk membangun IKN. Padahal,

”

JANGAN SAMPAI ADA HAL-HAL YANG NEGATIF TERKAIT KESEHATAN, TERKAIT JAMINAN TENAGA KERJA YANG MENCUAT KE ATAS, KARENA ITU AKAN MENIMBULKAN POLEMIK BARU, DIANGGAP KITA TIDAK TERLALU SIAP UNTUK MEMBANGUN IKN.

kita ingin pembangunan IKN itu bisa berjalan dengan lancar, dan semua stakeholder memberikan kontribusinya secara sinergi," ungkap Darul, di Titik Nol Ibukota Nusantara, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Kamis (2/2).

Dalam jangka panjang, Darul Siska mengharapkan rumah sakit, dan puskesmas yang ada di lingkungan akan mendapatkan tenaga kesehatan yang profesional, baik dokter maupun perawat, sehingga pelayanan kesehatan kepada yang bekerja di IKN tersebut bisa maksimal. Ia pun berharap Dinas Kesehatan bersama Kementerian Kesehatan menyiapkan tenaga-tenaga kesehatan yang profesional," ungkapnya.

"Tadi informasinya akan ada pembangunan Poltekes yang ada di Samarinda dan Balikpapan agar dimaksimalkan melatih tenaga-tenaga kesehatan untuk bekerja di fasilitas kesehatan yang ada sekitar IKN," ujar Darul.

Lebih lanjut, Darul juga berharap, perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar IKN membangun atau menyediakan klinik-klinik untuk penanganan darurat sementara. "Tadi diusulkan oleh Dinas Kesehatan agar perusahaan-perusahaan besar di sekitar IKN mempunyai klinik sendiri. Klinik itu, kan, sifatnya penanganan darurat sementara. Nanti kalau sudah dirujuk baru perlu ke rumah sakit atau puskesmas," ujarnya.

skr/mh

Scan QR untuk berita selengkapnya



Komisi IX Apresiasi Angka Stunting di Batam Lebih Rendah dari Nasional

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengapresiasi Pemerintah Kota Batam yang berhasil menurunkan angka kurangnya asupan gizi pada anak (stunting) menjadi 15 persen. Persentase ini lebih baik jika dibandingkan dengan stunting secara nasional sebesar 21 persen, angka ini juga mengalami penurunan dari yang sebelumnya 24 persen.

"Alhamdulillah secara nasional kita masih turun dari 24 persen pada tahun 2022 menjadi 21 persen. Saya mengapresiasi Kota Batam karena sudah di bawah angka nasional. Namun, kita tetap berharap angka ini akan terus mengalami tren penurunan. Karena kita tahu Batam menjadi kota yang sangat strategis karena menjadi kota perbatasan. Kita tidak mau nanti masyarakat terutama pemudanya ke depan kalah bersaing dengan negara tetangga," ujar Ninik, sapaan akrab Nihayatul Wafiroh saat memimpin Tim Kunspek Komisi IX bertemu dengan Jajaran Pemkot Batam, di Kota Batam, Provinsi Kepri, Kamis, (2/2).

Politisi F-PKB ini menambahkan, persoalan utama penurunan stunting ini secara umum ada pada anggaran yang minim. Walaupun sebetulnya anggaran secara nasional cukup besar, namun terbagi ke banyak wilayah di Indonesia dan lintas lembaga seperti BKKBN, Kemenkes, dan Kementerian lainnya. Persoalan stunting ini bukan persoalan gizi saja, tapi soal sanitasi, budaya dan lingkungannya.

"Oleh sebab itu, bila memang serius terkait kesejahteraan

pendamping stunting juga harus mendapatkan prioritas dari pemerintah. Pak Wali Kota di sini sudah mencontohkan, kader posyandu mendapat insentif sekitar Rp300 ribu tiap bulan. Ini luar biasa perhatiannya bisa menjadi percontohan,



Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh saat memimpin pertemuan Tim Kunspek Komisi IX DPR rapat dengan Jajaran Pemkot Batam, di Kota Batam, Provinsi Kepri, Kamis, (2/2).

karena ditempatkan lain untuk kader Posyandu hanya di kasih Rp100 ribu, uang segitu untuk buat makanan sehat 50 orang anak tentu

”

PERSOALAN UTAMA PENURUNAN STUNTING INI SECARA UMUM ADA PADA ANGGARAN YANG MINIM, WALAUPUN SEBETULNYA ANGGARAN SECARA NASIONAL CUKUP BESAR, TAPI TERBAGI KE BANYAK WILAYAH DI INDONESIA ...

sulit,"pungkas legislator Dapil Jatim III ini.

Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi ini mengatakan, permasalahan utama dari stunting ini terkait dengan ekonomi, sehingga masyarakat tidak mampu menangani masalah gizinya sendiri. Kota Batam, termasuk kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi terbaik di Provinsi Kepri, bahkan lebih tinggi dari nasional.

"Agar stunting selesai semua tentu kita berharap bantuan dan dukungan dari Komisi IX DPR dan Pemerintah Pusat, karena kalau kami sendiri mungkin agak repot. Apalagi jumlah penduduk yang masuk dari para pendatang cukup besar dan hampir semua masuk separuhnya kategori tidak mampu. jika tahun depan dia punya keluarga baru maka mungkin itulah penyebab stunting," terang Rudi. **jk/mh**



Sofyan Tan Soroti Persiapan F1H20 di Danau Toba

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan menyoroti persiapan agenda Formula 1 'Powerboat World Championship' (F1H20) yang akan berlangsung pada 24-26 Februari 2023 di Danau Toba, Sumatera Utara (Sumut). Menurutnya, persiapan agenda internasional tersebut masih sangat lamban, mengingat akan diselenggarakan dalam kurun waktu kurang dari satu bulan lagi.

Ia mengungkapkan, seharusnya promosi *event* F1H20 ini dilakukan sedari jauh hari, kurang lebih satu atau dua tahun sebelum agenda tersebut dimulai. Sebab, dengan promosi yang matang, akan berdampak pada ketertarikan investor untuk menunjang pembangunan fasilitas yang dibutuhkan.

"Agenda ini kurang dari 20 (dua puluh) hari lagi, tapi pembangunannya masih seret. Ini menjadi satu peringatan ke depan bahwa setiap *event* bertaraf internasional yang memiliki potensi besar untuk mendatangkan devisa negara seharusnya berkoordinasi lebih intensif dengan DPR RI. Karena selain fungsi legislasi, juga untuk menyiapkan anggaran serta pengawasan," ungkap Sofyan usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X ke Kabupaten Toba, Sumut, Kamis (2/2).

Selain itu, Politisi Dapil Sumut I tersebut juga menyoroti Sumber Daya Manusia (SDM) di sekitar kawasan Danau Toba. Menurutnya, perlu ada peningkatan SDM khususnya di bidang *hospitality* untuk menunjang kebutuhan pekerja dalam bisnis wisata, seperti



FOTO: UF/PDT

Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi X DPR RI ke Kabupaten Toba, Sumut, Kamis (2/2/2023).

pelayan hotel, *tour guide*, pramusaji, dan sebagainya.

Ia merasa standar pelayanan di Kawasan Danau Toba masih sangat

”

KAMI TADI MENYERTAKAN POLITEKNIK PARIWISATA MEDAN UNTUK DATANG, DENGAN HARAPAN MEMBERIKAN KUOTA BAGI PUTRA-PUTRI YANG ADA DI TOBA INI, UNTUK BISA MENJADI MAHASISWA DI POLITEKNIK PARIWISATA. DENGAN DEMIKIAN HASILNYA MEREKA AKAN KEMBALI KE DAERAH INI.

kurang, serta banyak pebisnis hotel serta makanan dan minuman yang kesulitan mencari pekerja di sekitar Danau Toba. Sehingga, harus mendatangkan pekerja dari luar daerah.

"Kami tadi menyertakan Politeknik Pariwisata Medan untuk datang, dengan harapan memberikan kuota bagi putra-putri yang ada di Toba ini, untuk bisa menjadi mahasiswa di Politeknik Pariwisata. Dengan demikian hasilnya mereka akan kembali ke daerah ini," pungkasnya.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Kabupaten Toba, Poltak Sitorus menjelaskan bahwa akan terdapat 2.100 kursi untuk penonton di lokasi utama F1H20. Dengan jumlah tersebut, ia berharap akan membawa dampak ekonomi yang besar karena datangnya wisatawan dari luar daerah. uf/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya



Pengelolaan Pariwisata di Belitung Masih Tergantung Swasta dan Minim Anggaran

Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU tentang Kepariwisataan Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah menyoroti beberapa permasalahan pariwisata di Kabupaten Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Menurutnya, pengelolaan pariwisata di kabupaten tersebut saat ini masih tergantung kepada pihak swasta dan minim anggaran dari pemerintah.

"Kami menemukan ada sejumlah persoalan yang masih harus diperbaiki bersama. Misalnya, terkait dengan situs-situs wisata yang sudah dikuasai oleh swasta. Sehingga, Pemerintah Daerah dan masyarakat juga tidak bisa membuat pengembangan dan pemeliharaan di (tempat) pariwisatanya. Jadi sangat tergantung kepada apa kemauan dan kehendak dari perusahaan tersebut," ujar Ledia usai pertemuan Tim Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI

”

KAMI MENEMUKAN ADA SEJUMLAH PERSOALAN YANG MASIH HARUS DIPERBAIKI BERSAMA. MISALNYA, TERKAIT DENGAN SITUS-SITUS WISATA YANG SUDAH DIKUASAI OLEH SWASTA.



Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa Amaliah saat mengikuti pertemuan Tim Panja RUU Kepariwisataan Komisi X DPR RI di Kabupaten Belitung, Kamis (2/2/2023).

di Kabupaten Belitung, Kamis (2/2).

Disisi lain, Politisi Fraksi PKS ini juga menyoroti minimnya alokasi anggaran untuk membangun sejumlah infrastruktur pendukung pariwisata di kabupaten tersebut. Salah satunya, alokasi anggaran untuk pengembangan Bandara Buluh Tumbang atau H.A.S. Hanandjoeddin International Airport yang terletak di Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Padahal, menurutnya, Belitung termasuk satu di antara 10 (sepuluh) destinasi Bali Baru.

"Tetapi, jumlah penerbangan yang dari dan menuju Belitung masih sangatlah sedikit, baik domestik maupun mancanegara. Padahal di Belitung sangatlah indah luar biasa karena sudah ditetapkan sebagai UNESCO *Global Park*," tegasnya.

Berangkat dari berbagai masalah ini, ia berkomitmen akan membawanya ke dalam Rapat Panja RUU tentang Kepariwisataan Komisi X DPR RI. Tindakan ini penting demi mencari solusi terbaik agar kondisi pariwisata di Belitung semakin maju ke depannya.

"Inilah modal beberapa masukan bagi kita untuk segera merumuskannya ke dalam RUU Pariwisata. Hal itu agar nantinya, baik pihak swasta, pemerintah daerah, maupun pemerintah pusat dapat menemukan jalan terbaik agar pariwisata di Belitung lebih maju lagi dan lebih banyak dikunjungi oleh wisatawan, baik domestik maupun luar negeri," tutup Legislator Dapil Jawa Barat I tersebut. **pdt/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnyanya



Komisi XI Minta Alokasi Dana Sawit untuk 'Replanting' Harus Diperbesar

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP memimpin Tim Kunjungan Kerja

Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat. Kunspik tersebut dalam rangka untuk mengevaluasi kinerja Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) terhadap kegiatan peremajaan tanaman (*replanting*) kelapa sawit di provinsi itu.

Komisi XI, tegasnya, menyatakan bahwa seharusnya BPDPKS dapat memberikan alokasi dana sawit untuk *replanting* yang lebih besar. Sehingga, hal itu dapat memberikan akses yang lebih luas bagi perkebunan sawit yang dimiliki rakyat. "Kita (Komisi XI) ingin porsi yang lebih besar, sehingga bisa memberikan akses yang lebih luas bagi kebun rakyat untuk *replanting*," kata Dolfie dengan sapaan akrabnya pada saat Kunspik Komisi XI di Pontianak, Kalimantan Barat, Kamis (2/2).

Dolfie menyampaikan, sebagaimana informasi yang diterima dari BPDPKS, bahwa sejauh ini terdapat tiga alokasi penggunaan dana sawit, yaitu untuk kegiatan sosial, peremajaan tanaman, dan biodiesel. Di antara tiga alokasi tersebut yang terbesar adalah biodiesel.

"Sebagaimana kita lihat tadi, profilnya satu persen itu digunakan untuk kegiatan sosial. Kemudian lima persen digunakan untuk *replanting*, dan 94 persen itu digunakan untuk kepentingan biodiesel," tegas Politisi Fraksi PDI-P itu.

Menurut Dolfie, seharusnya



Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie OFP saat memimpin pertemuan Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) Komisi XI DPR RI di Pontianak, Kalimantan Barat.

yang perlu diperbesar adalah porsi alokasi dana sawit pada *replanting* dan kegiatan sosial yang merupakan aspirasi dari masyarakat. "Tentu aspirasi dari wilayah-wilayah penghasil sawit adalah menemukan cara untuk porsi *replanting* dan kegiatan sosial bisa diperbesar," ucap Legislator Dapil Jawa Tengah IV.

”

TENTU ASPIRASI DARI WILAYAH-WILAYAH PENGHASIL SAWIT ADALAH MENEMUKAN CARA UNTUK PORSI REPLANTING DAN KEGIATAN SOSIAL BISA DIPERBESAR.

Namun, menurutnya, BPDPKS sendiri tidak dapat menentukan alokasi penggunaan dana sawit secara mandiri. Sebab, yang memiliki otoritas dari penentuan alokasi tersebut adalah Komite Pengarah BPDPKS. "Ini kita (Komisi XI) memang perlu mengundang Komite Pengarah (BPDPKS) karena penentuan daripada alokasi penggunaan dana sawit ini ditentukan oleh Komite Pengarah," tutup Dolfie.

Diketahui, *replanting* merupakan salah satu upaya mempertahankan produksi kelapa sawit melalui peremajaan kelapa sawit. Peremajaan tanaman berguna agar hasil produksi kelapa sawit tidak menurun drastis. Pengembangan perkebunan dapat dilakukan melalui perluasan lahan, lapangan kerja meningkat, dan peningkatan daya saing ekonomi basis perkebunan. **mun/rdn**

Scan QR untuk berita selengkapnya



Legislator Minta LPDP Kaji Ulang Syarat Sertifikat Bahasa Inggris

Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) mengkaji ulang persyaratan pendaftaran bagi beasiswa pendidikan kader ulama, khususnya terkait dengan sertifikat TOEFL. Menurutnya, persyaratan tersebut harus ditinjau kembali mengingat pendidikan untuk program tersebut berada di dalam negeri dan para ulama tersebut juga melakukan dakwah di Indonesia

"Saya berharap harus ada perlakuan khusus terhadap pondok-pondok pesantren. Karena, ini

kan ke dalam Indonesia, kenapa dia diharuskan lulus TOEFL? Jadi, ke depan bisa dikaji ulang yang ikut beasiswa kader ulama," ujar Politisi PPP ini setelah Rapat Dengar

”

SAYA BERHARAP HARUS ADA PERLAKUAN KHUSUS TERHADAP PONDOK-PONDOK PESANTREN KARENA, INI KAN KE DALAM, KENAPA DIA DIHARUSKAN LULUS TOEFL? JADI, KE DEPAN BISA DIKAJI ULANG YANG IKUT BEASISWA KADER ULAMA.

Pendapat Komisi XI dengan Dirut LPDP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2).

Legislator dapil Nusa Tenggara Barat II ini juga menyampaikan bahwa persyaratan sertifikat Bahasa Inggris tersebut sering menjadi permasalahan, terutama bagi calon pendaftar yang berasal jauh dari kota besar. Di sisi lain, calon penerima beasiswa masih harus bergelut dengan tahapan seleksi yang lebih substantif terkait dengan keilmuannya.

"Hari ini saya di-WA salah satu kasus di Nusa Tenggara Barat. Ikut program LPDP untuk kader ulama tetapi salah satu persyaratan juga TOEFL, apa urusannya? Ini menjadi catatan saja. Apakah itu harus menjadi persyaratan di kalangan pesantren?" ujarnya kepada Dirut LPDP.

Terkait dengan persyaratan sertifikat Bahasa Inggris, Anggota Komisi XI DPR RI Masinton Pasaribu juga menyoroti hal serupa. Politisi PDI-Perjuangan ini mempertanyakan peluang bagi para calon penerima beasiswa dari program afirmasi, baik melalui beasiswa daerah afirmasi maupun beasiswa prasejahtera.

Sebelumnya, Dirut LPDP Andin Hadiyanto menjelaskan bahwa untuk program afirmasi memiliki persyaratan nilai TOEFL yang cenderung lebih rendah dari program umum dan *targeted*. Nantinya para penerima beasiswa juga akan melaksanakan kursus Bahasa Inggris di perguruan tinggi yang dituju. [uc/mh](https://www.legislatif.go.id/uc/mh)



FOTO: MUN/PTD

Anggota Komisi XI DPR RI Wartiah saat Rapat Dengar Pendapat Komisi XI DPR RI dengan Dirut LPDP di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (1/2/2023).



Penggunaan E-Katalog Dapat Dipertanggungjawabkan dari Sisi Akuntabilitas

Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Sumariyandono menilai Kegiatan Sosialisasi Pengenalan dan Penggunaan Katalog Elektronik (e-katalog) adalah kegiatan yang sangat penting. Pasalnya, dari sisi akuntabilitas, penggunaan metode E-Katalog dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, setiap pelaksanaan pengadaan yang dilakukan di Setjen DPR RI telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Kemudian dari sisi prosesnya (penggunaan e-katalog ini) sudah sesuai dengan apa yang ada di dalam Perpres," ungkap pria yang kerap disapa Dono itu ketika menyampaikan sambutan dalam kegiatan tersebut, di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2). Dirinya menjelaskan bahwa Setjen DPR RI, mulai pada tahun 2023, ini akan menginisiasi penggunaan e-katalog dari yang sebelumnya melalui metode lelang, penunjukan langsung, maupun pengadaan langsung.

Terlebih, e-katalog ini menurutnya memudahkan, karena jumlah produk yang disiapkan, sudah cukup banyak masuk ke dalam e-katalog ini. Sehingga, dirinya mendorong pemanfaatan e-katalog ini. "Nah e-katalog sendiri ada e-katalog yang bersifat nasional. Di situ tentunya yang bertanggungjawab adalah LKPP, dan ada e-katalog yang sektoral,



FOTO: IKA/PDI

Deputi Bidang Administrasi Setjen DPR RI Sumariyandono saat sambutan Sosialisasi Pengenalan dan Penggunaan Katalog Elektronik (E-Katalog) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).

maupun yang regional. Yang sektoral inilah yang nanti akan kita coba dorong untuk diperbanyak lagi," lanjutnya.

Di akhir, dirinya berharap kegiatan sosialisasi tersebut mendorong semangat agar dapat bekerja lebih baik lagi di tahun 2023. Sehingga, sasaran-sasaran kegiatan yang sudah direncanakan dan ditetapkan bisa tercapai dengan baik. Selain itu juga untuk pelaksanaannya menjadi tidak ada kendala karena tidak ada aturan-aturan yang dilanggar.

"Untuk itu, saya mengajak kepada seluruh Bapak/Ibu sekalian yang hadir di saat ini untuk sama-sama menjaga integritas, menaati

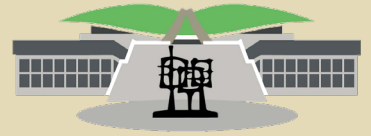
hukum, kemudian tetap bekerja keras kemudian meningkatkan transparansi dan tentunya adalah berdisiplin tinggi," pungkasnya.

Senada dengan Dono, Kepala Biro Umum Setjen DPR RI Rudi Rochmansyah menjelaskan bahwa Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Umum Sekretariat Jenderal DPR RI adalah pelaksana dari sosialisasi pengenalan dan penggunaan katalog Sekjen DPR RI. Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan dengan maksud untuk mempercepat proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2023.

hal/rdn

Scan QR untuk berita selengkapnya





Sosialisasi Pengenalan dan Penggunaan Katalog Elektronik (E-Katalog) di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023). FOTO:JKA/PDT



Pelaksanaan agenda Vaksinasi Covid-19 Booster ke-2 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta. FOTO:JKA/PDT



Perayaan Natal Bersama MPR RI, DPR RI, DPD RI Tahun 2022 dan Tahun Baru 2023. FOTO:MUN/PDT

